

PERSEPSI KEADILAN SOSIAL DAN KEPERCAYAAN INTERPERSONAL SEBAGAI PREDIKTOR KEPERCAYAAN POLITIK PADA MAHASISWA DI INDONESIA

Johan Wahyudi*¹, Mirra Noor Milla², & Hamdi Muluk¹

¹ Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia, Depok

² Fakultas Psikologi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau

*Email: johan.wahyudi.1994@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjawab pertanyaan yaitu faktor apa di antara variabel persepsi terhadap keadilan sosial atau variabel kepercayaan interpersonal yang paling memprediksi kepercayaan politik. Metode penelitian yang dipakai adalah korelasional, dengan subjek penelitian yaitu mahasiswa perguruan tinggi se-Indonesia yang berusia di atas 19 tahun, dengan teknik accidental sampling, dan didapatkan sejumlah 1161 responden. Persepsi keadilan sosial diukur dengan Procedural dan Distributive Justice Scale (Blader & Tyler, 2003), kepercayaan interpersonal diukur dengan Propensity to Trust Scale (Evans & Revelle, 2008), dan kepercayaan politik diukur dengan Citizen Trust in Government Organizations Scale (Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Hasil menunjukkan bahwa kepercayaan politik berkorelasi positif secara signifikan dengan persepsi keadilan sosial ($r = 0.714$, $n = 1161$, $p > 0.01$, one-tailed) dan kepercayaan interpersonal ($r = 0.112$, $n = 1161$, $p > 0.01$, one-tailed). Hasil dari analisis regresi juga menunjukkan bahwa persepsi keadilan sosial menjadi prediktor yang lebih kuat ($\beta = 0.711$) dibandingkan kepercayaan interpersonal ($\beta = 0.114$) terhadap kepercayaan politik.

Kata kunci: kepercayaan politik, persepsi keadilan sosial, kepercayaan interpersonal.

Abstract

The purpose of this research was to answer the question regarding whether perceived social justice or interpersonal trust is the stronger predictors of political trust. The research method was correlational study, using accidental sampling method, with university students above 19 years old as the research respondents. We successfully gathered 1161 respondent. Perceived social justice was measured by Procedural and Distributive Justice Scale (Blader & Tyler, 2003), interpersonal trust was measured by Propensity to Trust Scale (Evans & Revelle, 2008), and political trust was measured by Citizen Trust in Government Organizations Scale (Grimmelikhuijsen & Knies, 2015). Results show that political trust was positively correlated with perceived social justice ($r = 0.714$, $n = 1161$, $p > 0.01$, one-tailed) and interpersonal trust ($r = 0.112$, $n = 1161$, $p > 0.01$, one-tailed). Regression analysis showed that perceived social justice was the better predictor ($\beta = 0.711$) rather than interpersonal trust ($\beta = 0.114$) towards political trust.

Keywords : political trust, perceived social justice, interpersonal trust.

Pendahuluan

Pada awal tahun 2016, Edelman mempublikasikan hasil risetnya mengenai survei kepercayaan di Indonesia atau lebih dikenal dengan Edelman Trust Barometer. Hasil survei tersebut menunj-

kan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah berada di angka 58 persen, di mana angka tersebut menurun dari tahun lalu yang sebesar 65 persen. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah juga berada di bawah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan media (Edelman, 2016). Perbedaan tingkat kepercayaan masyarakat ini tidak hanya sekadar angka belaka karena hasil studi tersebut juga menunjukkan bahwa 80 persen dari responden di seluruh dunia lebih mempercayai sektor bisnis atau perusahaan sebagai kunci untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada (Edelman, 2016). Hasil ini menunjukkan bahwa secara global, pemerintah bukanlah institusi yang paling dipercaya oleh masyarakatnya.

Terdapat beberapa indikasi penyebab dari menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah, salah satunya adalah terkait isu yang paling menjadi perhatian dari masyarakat. Secara spesifik, di Indonesia, permasalahan yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah pengentasan kemiskinan (Edelman, 2016). Masyarakat ternyata berharap sektor bisnis atau perusahaan yang akan membantu pengentasan tersebut, dibandingkan institusi pemerintah (Edelman, 2016). Sementara, menurut amanat Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 negara seharusnya yang pertama berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya (Arisman, 2014). Hasil tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi sepenuhnya mempercayai pemerintah yang seharusnya menjadi aktor utama untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada.

Kepercayaan terhadap pemerintah memiliki berbagai istilah lain. Dari berbagai literatur akademik, kepercayaan terhadap pemerintah disebut dengan kepercayaan politik atau *political trust* (Seyd, 2016). Kepercayaan politik dapat didefinisikan secara singkat sebagai rasa percaya individu bahwa pemerintah akan berperforma dengan baik (Hardin, 2002). Kepercayaan politik menjadi penting untuk dibahas karena berkaitan dengan berbagai hal lain seperti meningkatkan

angka partisipasi publik di ranah politik (Almond & Verba, 1963; Stokes, 1962), persetujuan terhadap pengeluaran dana oleh pemerintah (Rudolph & Evans, 2005), dukungan secara umum terhadap kebijakan pemerintah (Chanley, Rudolph, dan Rahn, 2000), partisipasi pada pemilihan umum, dan kepatuhan terhadap hukum (Schiffman, Thelen, dan Sherman, 2010; Chanley, 2002).

Selain karena dampak pada perilaku publik, kepercayaan politik juga menjadi penting untuk dibahas karena berkaitan erat dengan kepuasan warga negara terhadap pemerintahnya (Blind, 2006) serta kualitas terhadap sistem demokrasi (Bonner, 2009). Oleh karena itu, menurut Blind (2006) kepercayaan politik dapat menjadi indikator kesuksesan dari suatu negara. Kepercayaan politik juga dapat menjadi indikator kesuksesan dari suatu negara karena salah satu faktor yang memprediksi kepercayaan politik adalah evaluasi individu terhadap pemerintah.

Dilihat dari subjeknya, kepercayaan politik dapat dibedakan secara makro dan mikro (Blind, 2006). Subjek dari kepercayaan politik yang dimaksud adalah acuan terhadap kata 'pemerintah' dalam definisi kepercayaan politik. Kepercayaan politik secara makro (*macro-level* atau *organizational trust*) berarti melihat 'pemerintah' sebagai suatu agregat dan melihat insitansi-institusi politik yang ada, sedangkan mikro (*micro-level* atau *individual political trust*) berarti melihat 'pemerintah' dalam konteks tokoh politiknya, seperti gubernur tertentu, presiden, dan lainnya. Secara makro, 'pemerintah' dapat dilihat secara *diffuse* (*system based trust*) yaitu secara agregat dan mengacu pada pemerintah secara umum dari suatu negara, maupun secara *specific political trust* yaitu melihat 'pemerintah' berdasarkan institusi-institusi politik seperti DPR dan kepolisian (Blind, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti memakai konteks kepercayaan politik dalam tingkat makro, tepatnya *diffuse* atau *system-based trust* sesuai dengan

bagaimana pemerintah dilihat secara keseluruhan pada survei Edelman (2016).

Kepercayaan politik menurut Grimmelikhuisen dan Knies (2015) terdiri atas tiga dimensi yaitu *perceived competence*, *perceived benevolence*, dan *perceived integrity*. *Perceived competence* didefinisikan sebagai sejauh mana warga negara mempersepsikan pemerintah mampu, efektif, cakap, dan profesional dalam bekerja (Grimmelikhuisen & Knies, 2015). *Perceived benevolence* didefinisikan sebagai sejauh mana warga negara mempersepsikan pemerintah peduli akan kesejahteraan publik dan termotivasi untuk bertindak atas kepentingan umum (Grimmelikhuisen & Knies, 2015). Terakhir, *perceived integrity* didefinisikan sebagai sejauh mana warga negara mempersepsikan pemerintah tulus, jujur, dan memenuhi janjinya (Grimmelikhuisen & Knies, 2015).

Terdapat berbagai faktor yang dapat memprediksi kepercayaan politik, selain evaluasi individu terhadap pemerintah. Mishler dan Rose (2001) menjelaskan dua perspektif yang menjadi pendekatan untuk melihat faktor-faktor yang memprediksi kepercayaan politik yaitu *institutional theory* dan *cultural perspective*. *Institutional theory* menjelaskan bahwa institusi yang berperforma baik akan menciptakan kepercayaan, sedangkan institusi yang bekerja dengan tidak baik akan menciptakan ketidakpercayaan dan skeptisme (Mishler & Rose, 2001). Kepercayaan politik dibentuk atas terpenuhinya ekspektasi bahwa sebuah institusi politik berperforma secara memuaskan (Coleman, 1990, dalam Mishler & Rose, 2001). Oleh karena itu, kepercayaan politik merupakan dampak performa suatu institusi dan bukan hal yang memprediksi penilaian performa suatu institusi (Mishler & Rose, 2001).

Pendekatan kedua dari Mishler dan Rose (2001), yaitu *cultural perspective*. *Cultural perspective* menjelaskan bahwa kepercayaan politik adalah perpanjangan dari interpersonal trust atau kepercayaan interpersonal di mana hal tersebut dibentuk

semenjak tahap kehidupan awal, yang nantinya terarah kepada insititusi politik serta penilaian performanya (Inglehart, 1997; Putnam, 1993). *Cultural perspective* cocok untuk menjelaskan temuan bahwa kepercayaan politik dipengaruhi oleh latar belakang individu seperti gender, umur, pendidikan, preferensi politik (lihat King, 1997; Putnam, 2000; Norris, 2001), status minoritas (You, 2005), dan lainnya. Berbeda dengan pendekatan *institutional theory*, *cultural perspective* menekankan pengaruh lingkungan dalam jangka waktu yang lama dan berpengaruh terhadap perbedaan individual dalam melihat kepercayaan politik (Mishler dan Rose, 2013).

Hasil studi Mishler dan Rose (2001) di 10 negara menunjukkan bahwa penjelasan dari *institutional theory* lebih tepat dalam memprediksi kepercayaan politik dibandingkan *cultural perspective*. Hasil serupa juga ditemukan oleh peneliti lain bahwa kepercayaan politik lebih dapat dijelaskan secara rasional (lihat van Elsas, 2015; Tao, Su, Sun, dan Lu, 2011) terkait evaluasi performa pemerintahan sesuai dengan *institutional theory*. Dalam penjelasan dari *institutional theory*, juga diakui adanya pengaruh *cultural perspective* dalam membentuk kepercayaan politik seperti halnya evaluasi terhadap pemerintahan sebelumnya (Mishler & Rose, 2001). Oleh karena itu, baik *institutional theory* maupun *cultural perspective* tidak dapat menjelaskan kepercayaan politik secara independen. Perdebatan yang masih berlanjut antara kedua pendekatan ini perihal pandangan mana yang dapat lebih diandalkan untuk menjelaskan kepercayaan politik (Mishler & Rose, 2001).

Indikasi menurunnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah karena isu tertentu sesuai fenomena studi ini dapat dijelaskan dengan *institutional theory* bahwa pemerintah tidak menjalankan performanya dengan baik, yaitu pengentasan kemiskinan. Kumlin (2004) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor utama terkait evaluasi terhadap

Pemerintahan yang dapat berpengaruh terhadap kepercayaan politik yaitu *self-interest* (minat pribadi), *distributive justice*, dan *procedural justice*. *Distributive justice* (keadilan distributif) dan *procedural justice* (keadilan prosedural) dikategorikan sebagai *social justice* atau keadilan sosial (Kumlin, 2004).

Minat pribadi menjelaskan bahwa individu membentuk sikap terhadap politik berdasarkan ketertarikan dan kebutuhan individualnya. Sedangkan keadilan sosial berorientasi pada penilaian menyeluruh individu secara makro terhadap pemerintah dan keadaan di sekitar individu. Pengentasan kemiskinan merupakan suatu permasalahan sosial dan cenderung di luar dari individu yang bersangkutan, terkecuali apabila individu tersebut merasa masuk ke dalam masyarakat miskin. Oleh karena itu, pendekatan dari faktor persepsi terhadap keadilan sosial lebih sesuai dengan latar belakang studi ini dibandingkan dengan pendekatan minat pribadi.

Keadilan sosial terdiri atas keadilan distributif dan keadilan prosedural. Rawls (1971) mendefinisikan keadilan distributif sebagai keadilan yang berorientasi pada alokasi dan hasil dari sumber daya yang sesuai dengan prinsip keadilan. Secara lebih detil, keadilan distributif berawal dari tiga hal. Tiga hal tersebut adalah "*equality*" yang berarti setiap orang menerima hasil yang sama, "*equity*" yang berarti hasil pribadi seharusnya sesuai dengan kontribusinya, dan "*need*" yang berarti hasil dapat bervariasi menyesuaikan kebutuhan pribadi (Deutsch, 1985). Kumlin (2004) berpendapat bahwa keadilan akan mempengaruhi rasa keadilan secara umum dan membentuk persepsi kepercayaan. Oleh karena itu, keadilan dalam konteks politik dapat mempengaruhi kepercayaan politik. Keadilan prosedural secara singkat dapat didefinisikan sebagai kebebasan dan kesamaan yang adil terhadap kesempatan berpartisipasi dalam pemerintahan (Rawls, 1971). Menurut Rawls (1971, dalam Kumlin 2004), bentuk kebebasan dan kesempatan ini dapat

berupa mekanisme pemilihan umum, mekanisme *check and balances*, serta pelibatan dalam pembuatan kebijakan.

Blader dan Tyler (2003) menyatakan empat kriteria dari dua dimensi keadilan prosedural yaitu (a) evaluasi terhadap aturan dan kebijakan terkait kebijakan dibentuk (*formal decision making*), (b) evaluasi terhadap aturan dan kebijakan yang memengaruhi bagaimana suatu kelompok diperlakukan (*formal quality of treatment*), (c) evaluasi terhadap bagaimana proses suatu kelompok yang berkuasa membuat aturan (*informal decision making*), and (d) evaluasi terhadap bagaimana kelompok yang berkuasa memperlakukan kelompok lainnya (*informal quality of treatment*). Sebagai suatu konsep yang melibatkan proses kognitif, persepsi keadilan dilihat bukan sebagai evaluasi sebenarnya terkait pemerintah saja. Dalam konteks penelitian, pengukuran terkait keadilan atau *justice* maupun *fairness* memakai kata "*perceive*" (lih. Lind, Kanfer, & Early, 1990). Keadilan yang dinilai oleh individu terkait keadilan distributif atau keadilan prosedural merupakan persepsi dari individu dan tidak benar-benar menggambarkan keadilan absolut secara sebenarnya. Studi ini menilai keadilan sosial sebagai keadilan yang dipersepsikan oleh individu.

Mengingat karakteristik dan budaya di masyarakat di tiap negara berbeda, pandangan dari *cultural perspective* juga diperlukan untuk melihat kepercayaan politik di Indonesia. Salah satu faktor yang termasuk dalam *cultural perspective* dan dapat menjelaskan kepercayaan politik adalah *interpersonal trust*. Mengutip Rotter (1967), *interpersonal trust* atau kepercayaan interpersonal adalah pengharapan yang dimiliki oleh individu atau kelompok bahwa kata, janji, perkataan, dan tulisan dari pihak lain dapat diandalkan. Pengharapan yang dimaksud digeneralisir dan menjadi stabil pada berbagai konteks dan membentuk kepribadian (Rotter, 1980). Kepercayaan interpersonal terbentuk atas interaksi

dalam jangka waktu yang lama dan memengaruhi berbagai hal, namun di zaman modern ini, interaksi dapat terjadi secara tidak langsung seperti media massa.

Secara teoretis, pendekatan *cultural perspective* juga menjelaskan bahwa kepercayaan politik bermula dari kepercayaan interpersonal yang terbentuk selama kehidupan dan kemudian membentuk kepercayaan individu terhadap pemerintah (Inglehart, 1997; Putnam, 1993). Mayer dkk. (1995) mendefinisikan kepercayaan secara umum sebagai kesediaan bagi suatu pihak untuk menjadi rentan terhadap perilaku pihak lain, berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan melakukan perilaku yang baik bagi dirinya tanpa perlu diawasi dan dikendalikan. Terdapat dua hal yang membentuk kepercayaan secara umum yaitu kesediaan untuk merasa rentan dan penilaian terhadap orang lain. Kedua hal ini selanjutnya menjadi komponen kepercayaan interpersonal (Evans & Revelle, 2008) yaitu *trust* dan *trustworthiness*. *Trust* secara umum dalam kepercayaan interpersonal terkait dengan penerimaan individu terhadap kerentanan atas dirinya. *Trust* muncul di situasi di mana individu menerima hasil yang tidak pasti yaitu kemungkinan adanya *reciprocity* atau *betrayal* (Evans & Revelle, 2008). Kemungkinan yang dimaksud adalah, individu akan berada di situasi di mana dirinya bergantung kepada orang lain dan hasil kebergantungannya dapat menguntungkan bagi dirinya sesuai atas kepercayaannya (*reciprocity*) atau tidak menguntungkan dan tidak sesuai dengan kepercayaannya (*betrayal*). Selanjutnya, *trustworthiness* yang sering diteliti bersamaan dengan *trust* dianggap menjadi kompelemen natural dari *trust* (Evans & Revelle, 2008) dalam konteks kepercayaan interpersonal. Hal ini dikarenakan kepercayaan interpersonal tidak terlepas dari ekspektasi atas pihak lainnya.

Mayer dkk. (1995) mengidentifikasi tiga faktor yang terkait *trustworthiness*

yaitu *ability* (kumpulan kemampuan, kompetensi, dan karakteristik yang membuat sebuah pihak memiliki pengaruh pada suatu konteks), *benevolence* (keinginan untuk menolong orang lain, walaupun mengorbankan diri mereka sendiri), dan *integrity* (keinginan untuk mempertahankan aturan dan norma sosial). Ketiga faktor ini juga sesuai dengan faktor kepercayaan politik yang diukur, namun memiliki perbedaan inti di mana pada kepercayaan politik, persepsi kepercayaan mengacu kepada pemerintahan dan pada kepercayaan interpersonal mengacu pada manusia secara umum. Pandangan bahwa kepercayaan interpersonal dapat berkorelasi dengan kepercayaan politik juga didasari oleh argumen bahwa individu yang lebih mempercayai orang lain secara umum akan memandang pemerintah sebagai objek yang lebih dapat dipercaya, dibandingkan individu yang tidak mempercayai orang secara umum. Hasil ini dibuktikan oleh studi Schiffman, Thelen, dan Sherman (2010), yang menemukan bahwa terdapat korelasi positif antara kepercayaan interpersonal dengan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan kepercayaan terhadap tokoh politik. Studi dari Luhmann (1989) menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kepercayaan interpersonal dan kepercayaan politik.

Studi sebelumnya (lih. Mishler & Rose, 2001; van Elsas, 2015; Tao dkk., 2011) menunjukkan bahwa faktor *institutional theory* menjadi prediktor yang lebih kuat dibandingkan pendekatan *cultural approach*. Studi sebelumnya meneliti di berbagai negara di Eropa dan negara Republik Rakyat Tiongkok, namun studi serupa di Indonesia belum dilakukan. Mengingat data penelitian dari Mishler dan Rose (2001) berasal dari negara-negara selain Indonesia, konteks Indonesia mungkin memberikan penjelasan yang berbeda terkait kepercayaan politik. Jumlah studi terkait kepercayaan politik di Indonesia masih cukup minim, terutama terkait kepercayaan politik secara *diffuse*

atau *system-based trust*. Studi terkait kepercayaan politik di Indonesia lebih berfokus pada hubungan kepercayaan politik dengan partisipasi politik (lih. Handaningrum & Rini, 2014; Wahyudi dkk., 2013). Studi lebih lanjut terkait kepercayaan politik diperlukan untuk mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor yang memprediksi kepercayaan politik di Indonesia. Dua pendekatan dari Mishler dan Rose (2001) dapat menjadi awal untuk menjelaskan faktor-faktor yang memprediksi kepercayaan politik di Indonesia. Oleh karena itu, dengan 2 variabel yang mewakili kedua pendekatan tersebut, studi ini melihat persepsi keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal sebagai prediktor dari kepercayaan politik. Studi ini melihat korelasi dari persepsi keadilan sosial dengan kepercayaan politik, korelasi dari kepercayaan interpersonal dengan kepercayaan politik, dan terakhir melihat besarnya kontribusi dari persepsi keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal terhadap kepercayaan politik.

Berdasarkan tinjauan teoritis tersebut, peneliti merancang metode penelitian yang akan dipakai. Hipotesis yang peneliti ajukan yaitu, (1) terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara persepsi keadilan sosial dengan kepercayaan politik di Indonesia, (2) terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara kepercayaan interpersonal dengan kepercayaan politik di Indonesia, dan (3) persepsi keadilan sosial adalah prediktor kepercayaan politik yang lebih kuat dibandingkan kepercayaan interpersonal. Penelitian ini tergolong sebagai *applied research* berorientasi pada penerapan teori terhadap situasi dan permasalahan asli, serta hasilnya dapat dimanfaatkan untuk tujuan praktis, *correlational research* karena berorientasi meneliti kaitan antara dua atau lebih variabel, *quantitative research* karena memakai data numerikal/angka, dan studi ini memakai *primary data* karena peneliti mengambil

data langsung dari sampel penelitian (Kumar, 1996).

Metode Penelitian

Desain penelitian ini adalah *cross-sectional studies* karena hanya melakukan satu kali pengambilan data dari sampel penelitian, *retrospective study* karena meneliti variabel yang ditampilkan pada gejala atau fenomena yang sudah terjadi di masa lalu, dan *non-experimental study* karena dalam penelitian ini sama sekali tidak dilakukan manipulasi terhadap variabel independen (Kumar, 2005).

Karakteristik dari responden adalah warga negara Republik Indonesia di atas 19 tahun dengan pertimbangan, responden pernah mendapat kesempatan untuk mengikuti pemilu 2014 lalu yaitu memenuhi batas usia 17 tahun. Responden diharapkan sudah memiliki kesempatan untuk memberikan partisipasi politik secara konkret. Karakteristik kedua adalah responden merupakan mahasiswa aktif di negara Republik Indonesia, karena kemudahan mengakses data dan mengontrol *extraneous variable* agar data yang masuk tidak terlalu beragam latar belakangnya. Penelitian sebelumnya terkait kepercayaan politik di Indonesia juga sudah memakai responden mahasiswa karena mahasiswa sudah potensial memberikan partisipasi politik yang kongkret seperti mengikuti diskusi, studi terkait pemerintahan, mengikuti pemilihan umum dalam kampus maupun secara nasional, dan mengikuti lembaga kemahasiswaan yang sesuai sejarah memiliki kekuatan politik seperti BEM (lih. Handaningrum & Rini, 2014; Wahyudi dkk., 2013).

Berdasarkan karakteristik responden, teknik pengambilan responden yang dipakai adalah *non-probability sampling* karena jumlah populasi total mahasiswa di atas 19 tahun tidak diketahui secara pasti dan setiap responden tidak memiliki kesempatan yang sama untuk diukur sebagai responden. Secara lebih spesifik,

teknik yang dipakai adalah *accidental sampling* di mana responden terpilih berdasarkan kemudahan mengakses data dan kesediaan untuk berpartisipasi (Gravetter & Forzano, 2012).

Berdasarkan hipotesis penelitian, terdapat tiga variabel yang diukur dalam penelitian ini yaitu persepsi keadilan sosial, kepercayaan interpersonal, dan kepercayaan politik. Variabel keadilan sosial pada penelitian ini diukur dengan memakai alat ukur *Procedural and Distributive Justice Scale* yang dikembangkan oleh Blader dan Tyler (2003). Alat ukur ini mengukur keadilan prosedural dengan lima komponennya sejumlah 32 item dan mengukur keadilan distributif sejumlah 9 item. Kuesioner yang mengukur keadilan distributif dimodifikasi sesuai dengan komponen keadilan distributif oleh Deutsch (1985) yaitu *equality*, *equity*, dan *need*. Total item dari kuesioner ini berjumlah 42 item.

Variabel kepercayaan interpersonal pada penelitian ini diukur dengan memakai alat ukur *Propensity to Trust Scale* yang dikembangkan oleh Evans dan Revelle (2008). Alat ukur ini mengukur kecenderungan orang untuk percaya kepada orang lain, dilihat dari 2 komponen yaitu *trustworthiness* sebanyak 10 item dan *trust* sebanyak 11 item. Total item dari kuesioner ini berjumlah 21 item. Variabel kepercayaan politik pada penelitian ini diukur dengan memakai alat ukur *Citizen Trust in Government Organizations Scale* yang dikembangkan oleh Grimmelikhuisen dan Knies (2015). Alat ukur ini mengukur kepercayaan orang terhadap institusi pemerintah dan terdiri dari tiga dimensi yaitu *perceived competence* sebanyak 5 item, *perceived benevolence* sebanyak 3 item, dan *perceived integrity* sebanyak 4 item. Total item dari kuesioner ini berjumlah 12 item.

Peneliti melakukan proses adaptasi alat ukur penelitian yang aslinya tertulis dalam bahasa Inggris. Pertama, alat ukur yang sudah ditranslasi, diujikan kepada tiga orang, direvisi, dilakukan *back translation*, kemudian terakhir dilakukan

expert judgement. Alat ukur tersebut kemudian diujicobakan untuk melihat validitas dan reliabilitas alat ukur tersebut. Uji reliabilitas dengan *alpha –Cronbach* dengan hasil yaitu ketiga alat ukur yang dipakai di penelitian ini memiliki reliabilitas yang tinggi (*Procedural dan Distributive Justice Scale* $\alpha = 0.943$, *Propensity to Trust Scale* $\alpha = 0.839$, *Citizen Trust in Government Organizations Scale* $\alpha = 0.930$). Uji validitas dilakukan dengan melihat *internal consistency*, dengan hasil yaitu tidak ada item pada alat ukur yang memiliki konsistensi internal yang buruk.

Pengambilan data penelitian dilakukan pada 10 Juni-12 Juni 2016. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei online dan menggunakan platform *Google Form*. Metode survei online dipakai peneliti dengan pertimbangan lebih luasnya cakupan demografis data, kemudahan mengakses kuesioner, dan efisiensi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yang besar. Pengambilan data responden ditutup pada 12 Juni 2016 pukul 23.59 WIB. Jumlah responden yang mengisi kuesioner penelitian ini berjumlah 1333 orang. Setelah melakukan pengecekan data dan eliminasi data berdasarkan uji normalitas, peneliti memakai data dari 1161 responden.

Peneliti memakai 3 analisis untuk mengolah data penelitian. Analisis deskriptif dipakai untuk melihat gambaran karakteristik demografis responden yaitu usia, jenis kelamin, dan domisili. Analisis deskriptif juga dipakai untuk melihat gambaran umum variabel penelitian seperti rata-rata total skor, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Analisis selanjutnya yang dipakai untuk menguji hipotesis penelitian adalah *Pearson product-moment correlation* untuk melihat hubungan dari seluruh faktor dan variabel yang diteliti. Peneliti memfokuskan pada variabel yang menjadi hipotesis penelitian. Teknik ini dipakai untuk membuktikan hipotesis pertama dan kedua penelitian. Hipotesis ketiga dan keempat penelitian

Tabel 1. Gambaran Demografis Responden Penelitian

Karakteristik Demografis	Total (N=1161)	
	Frekuensi	Persentase
Asal Universitas		
Universitas Indonesia	650	56.0%
Lainnya	551	44.0%
Usia		
19 – 24 tahun	1146	98.7%
24 – 31 tahun	15	1.3%
Domisili		
Jabodetabek	861	74.2%
Luar Jabodetabek	300	25.8%
Jenis Kelamin		
Pria	391	33.7%
Wanita	770	66.3%

dibuktikan dengan *linear regression*. Pertama, peneliti melakukan *linear regression* atas variabel prediktor yaitu keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal secara terpisah terhadap kepercayaan politik. Setelah melihat hasilnya dan dirasa perlu mengontrol faktor demografis, peneliti melakukan *hierarichal multiple regression* untuk membuktikan hipotesis keempat dan kelima penelitian.

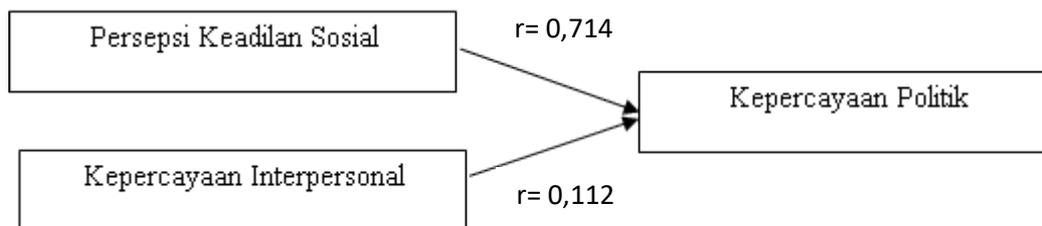
Hasil Penelitian

Peneliti mendapatkan 1141 data sebagai hasil dari pengambilan data yang dilakukan oleh peneliti setelah melewati proses seleksi data dan uji normalitas. Gambaran demografis dari responden tercantum pada tabel 1.

Responden penelitian sebagian besar berasal dari Universitas Indonesia (N=650, 56.0%) dan lainnya berasal dari lebih dari 100 universitas di seluruh Indonesia seperti dari Sumatera (contoh, Universitas Syiah Kuala), Jawa (contoh, Universitas Gadjah Mada), Bali (contoh, Universitas Udayana), dan Indonesia Tengah (contoh, Universitas Hassanudin). Variasi universitas juga berasal dari universitas negeri (contoh, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro) dan universitas swasta (contoh, Universitas Ciputra, Universitas Bina

Nusantara). Mayoritas dari responden yang mengisi data penelitian ini berusia antara 19-24 tahun (N=1146, 98.7%), berdomisili di Jabodetabek (N=861, 74.2%). Responden di luar Jabodetabek berasal dari berbagai wilayah seperti Sumatera (Aceh, Lampung, dan lainnya), Jawa (Bandung, Jogjakarta, Surabaya, dan lainnya), Bali, serta wilayah Indonesia Tengah (Gowa dan Makassar). Berdasarkan jenis kelamin responden, 66.3% responden adalah wanita (N=770) dan 33.7 responden adalah pria (N=391).

Peneliti menggunakan *pearson product-moment correlation test* untuk menguji hipotesis pertama dan kedua penelitian. Hipotesis pertama yaitu apakah keadilan sosial berkorelasi positif secara signifikan dengan kepercayaan politik. Hasil menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara keadilan sosial (*social justice*) dengan kepercayaan politik (*political trust*) sebesar 0,714. ($r = 0.714$, $n = 1161$, $p > 0.01$, *one-tailed*). Hipotesis kedua penelitian yaitu apakah kepercayaan interpersonal berkorelasi positif secara signifikan dengan kepercayaan politik. Hasil menunjukkan korelasi positif yang signifikan antara kepercayaan interpersonal (*interpersonal trust*) dengan kepercayaan politik sebesar 0,112. ($r = 0.112$, $n = 1161$, $p > 0.01$, *one-tailed*). Koefisien korelasi tersebut signifikan



Gambar 1. Korelasi Antar-Variabel

pada LoS 0,01 ($p=0,00$). Korelasi antar variabel dapat dilihat pada gambar 2.

Pengujian hipotesis ketiga dilakukan dengan memakai teknik analisis statistik *linear regression* dengan metode *enter*. Hipotesis ketiga penelitian ini mengacu pada variabel keadilan sosial atau kepercayaan interpersonal yang menjadi prediktor yang lebih kuat atas kepercayaan politik. Hasil pembuktian hipotesis dengan *linear regression*, menghubungkan keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal dengan kepercayaan politik secara terpisah. Hasil menunjukkan bahwa keadilan sosial ($\beta=0,714$) lebih kuat berkontribusi atas skor kepercayaan politik dibandingkan kepercayaan interpersonal ($\beta=0,112$). Hal ini berarti, skor keadilan sosial memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap kepercayaan politik dibandingkan kepercayaan interpersonal. Secara lebih lanjut, sebelum peneliti menyimpulkan terbuhtinya hipotesis penelitian, dilakukan *hierarichal multiple regression* terhadap variabel keadilan sosial, kepercayaan interpersonal, dan kepercayaan politik. Dengan model ini, dilakukan kontrol terhadap karakteristik demografis yang dapat mempengaruhi hasil analisis statistik. Hasil menunjukkan bahwa bahwa skor keadilan sosial ($\beta=0,711$) masih lebih kuat berkontribusi atas skor kepercayaan politik dibandingkan kepercayaan interpersonal ($\beta=0,114$) setelah mengontrol variabel demografis. Dengan demikian, hasil analisis ini membuktikan penolakan atas H_{03} , serta menerima H_{A3} bahwa keadilan sosial adalah prediktor kepercayaan politik yang

lebih kuat dibandingkan kepercayaan interpersonal.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa keadilan sosial dapat memprediksi kepercayaan politik di Indonesia, tidak berbeda dengan hasil riset di negara Eropa (lihat Kestilä-Kekkonen & Söderlund, 2015). Keadilan sosial merupakan salah satu cara untuk melihat hasil evaluasi kerja pemerintah dan hasil riset selama ini berfokus pada pengaruh evaluasi kerja pemerintahan terhadap kepercayaan politik. Evaluasi terhadap pemerintahan dapat memprediksi kepercayaan politik karena secara filosofis, konsep pemerintahan dan kepercayaan politik terhadapnya adalah gambaran dari kedaulatan pemerintahan itu sendiri. Bentham (1999, dalam Blind, 2006) menyatakan bahwa kepercayaan politik muncul karena pada dasarnya kita memang seharusnya waspada kepada pemerintah karena mereka memiliki kekuasaan yang besar dan dapat menjadi tergoda untuk menyalahgunakannya. Hal ini disebabkan juga karena kita tidak dapat mengetahui secara pasti motivasi dan tindakan yang akan dilakukan oleh pemimpin politik kedepannya (Przeworski, 1991, dalam Blind, 2006).

Studi lebih lanjut mengenai hubungan kepercayaan interpersonal dan kepercayaan politik juga dapat dilakukan. Studi sebelumnya yang dilakukan oleh Schiffman, Thelen, dan Sherman, (2010) menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara kepercayaan interpersonal dan kepercayaan pemerintah. Secara spesifik, kepercayaan interpersonal berkorelasi kuat dengan

kepercayaan terhadap tokoh politik (*incumbent trust*) dan berkorelasi lemah namun signifikan terhadap pemerintah sebagai sebuah keseluruhan (*trust in government form*). Terdapat kemungkinan bahwa kepercayaan interpersonal tidak dapat langsung menjadi variabel prediktor terhadap kepercayaan politik, walaupun menurut Inglehart (1997) dan Putnam (1993), kepercayaan politik terbentuk atas perpanjangan dari kepercayaan interpersonal, kepercayaan interpersonal tidak dapat langsung dijadikan prediktor dari kepercayaan politik.

Hasil studi juga menunjukkan bahwa faktor demografis ternyata dapat memprediksi kepercayaan politik lebih baik dibandingkan mengukur kepercayaan interpersonal. Penelitian ini berusaha mengontrol variasi demografis dengan membatasi partisipan meliputi mahasiswa saja, namun dari faktor demografis lainnya, ternyata perbedaan masih ditemukan. Hasil yang ditemukan di penelitian ini berbeda dengan hasil yang ditemukan dari penelitian Schoon dan Cheng (2011). Walaupun domisili yang dapat mewakili perbedaan sosial-ekonomi, sumber daya, dan lainnya, pada riset Schoon dan Cheng (2011) menunjukkan individu dengan akses yang lebih tinggi atas sumber daya memiliki kepercayaan politik yang lebih tinggi. Kesimpulan dari diskusi ini adalah, persepsi keadilan sosial memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap kepercayaan politik dengan melalui pemrosesan informasi jalur sentral atas kepercayaan politik. Faktor jenis kelamin dan faktor domisili juga dapat menjadi prediktor terhadap kepercayaan politik.

Kesimpulan

Terdapat lima kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini. Pertama adalah bahwa persepsi keadilan sosial memiliki hubungan dengan kepercayaan politik. Kedua, kepercayaan interpersonal memiliki hubungan dengan kepercayaan politik. Ketiga, persepsi keadilan sosial memiliki pengaruh yang

lebih besar terhadap kepercayaan politik dibandingkan dengan kepercayaan interpersonal. Keempat, faktor demografis yang berpengaruh terhadap kepercayaan politik adalah faktor domisili dan jenis kelamin. Kelima, responden yang membayangkan institusi pemerintahan eksekutif memiliki tingkat kepercayaan politik yang lebih tinggi dibandingkan responden yang membayangkan institusi pemerintahan legislatif.

Saran metodologis yang didapat dari penelitian ini dapat dipakai sebagai pertimbangan ketika akan melakukan penelitian selanjutnya. Saran tersebut yaitu mengembangkan lebih lanjut ketiga kuesioner penelitian ini. Selama proses pengambilan data, beberapa responden ternyata masih tidak sepenuhnya mengerti makna dari item yang ada pada kuesioner. Saran kedua adalah melakukan metode yang lebih bervariasi untuk menjawab permasalahan penelitian. Kepercayaan politik adalah konsep yang abstrak dan faktor yang memprediksinya baru dibahas oleh peneliti dari luar negeri. Dengan metode penelitian mengikuti alur kuantitatif seperti ini, penjelasan baru yang belum ditemukan menjadi sulit ditemukan. Saran ketiga adalah memakai teknik *sampling* yang lebih memungkinkan mendapat responden penelitian yang merata dan representatif. *Quota sampling* adalah salah satu contoh metode pengumpulan data yang dapat memberikan kemungkinan mendapat sampel yang representatif dari berbagai daerah.

Penelitian akademik terkait kepercayaan politik Indonesia belum terlalu banyak dilakukan, terutama dengan melihat kepercayaan politik sebagai variabel terikat. Penelitian terkait hubungan antara keadilan sosial dan kepercayaan interpersonal dengan kepercayaan politik juga belum pernah dilakukan sebelumnya di Indonesia. Penelitian banyak melihat dampak dari kepercayaan politik seperti terhadap perilaku politik dan lainnya, namun penelitian yang melihat sebab dan prediktor dari kepercayaan politik masih

perlu lebih banyak dilakukan. Kedepannya, studi terkait variabel lain dari kedua pendekatan ini perlu dilakukan di konteks Indonesia, terutama variabel selain kepercayaan interpersonal yang terbukti tidak menjadi prediktor yang kuat terhadap kepercayaan politik.

Daftar Pustaka

- Almond, G. A., dan Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Arisman, O. (2014). Peran kepemimpinan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. *Makalah Kepemimpinan Kementrian Hukum dan HAM*. Kementrian Hukum dan HAM.
- Blader, S. L., dan Tyler, T. R. (2003). A four-component model of procedural justice: Defining the meaning of a "fair" process. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 29(6), 747-758.
- Blind, P. K. (2007). Building trust in government in the twenty-first century: Review of literature and emerging issues. In *7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government* (pp. 26-29).
- Bonner, D. E. (2009). *A comprehensive examination of the determinants and consequences of political trust among Latinos*. ProQuest.
- Chanley, V. A. (2002). Trust in government in the aftermath of 9/11: Determinants and consequences. *Political psychology*, 23(3), 469-483.
- Chanley, V. A., Rudolph, T. J., dan Rahn, W. M. (2000). The origins and consequences of public trust in government: A time series analysis. *Public opinion quarterly*, 64(3), 239-256.
- Deutsch, M. (1985). *Distributive Justice. A Social-Psychological Perspective*. New Haven :Yale University Press
- Edelman (2016). *Edelman trust barometer 2016*. Diakses di <http://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/> pada 20 Mei 2016.
- Evans, A. M., dan Revelle, W. (2008). Survey and behavioral measurements of interpersonal trust. *Journal of Research in Personality*, 42(6), 1585-1593.
- Gravetter, F. J., dan Forzano, L. A. B. (2012). *Research Methods for the Behavioral Sciences 4th edition*. Wadsworth: Cengage Learning.
- Grimmelikhuijsen, S., dan Knies, E. (2015). Validating a scale for citizen trust in government organizations. *International Review of Administrative Sciences*, 0020852315585950.
- Grimmelikhuijsen, S. G., dan Meijer, A. J. (2012). The effects of transparency on the perceived trustworthiness of a government organization: Evidence from an online experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*
- Hardin, R. (1993). The street-level epistemology of trust. *Politics and Society* 21(4): 505-529.
- Hardin, R. (2002). *Trust dan Trustworthiness*. Sage Foundation Series on Trust. New York: Russell Sage Foundation, Russell.
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and postmodernization: Cultural, economic, and political change in 43 societies*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Kestilä-Kekkonen, E., dan Söderlund, P. (2015). Political Trust, Individual-level Characteristics and Institutional Performance: Evidence from Finland, 2004-13. *Scandinavian Political Studies*.

- 39: 138–160. doi: 10.1111/1467-9477.12052
- King, D.C. (1997). The polarization of american parties and mistrust of government. In *Why people don't trust government*, edited by J.S. Nye, P.D. Zelikow, and D.C. King, 155-178. Cambridge: Harvard University Press
- Kumar, R. (1996, 2005). *Research methodology: A step-by-step guide for beginners*. London: SAGE Publications.
- Kumlin, S. (2004). The personal and the political. In *The Personal and the Political: How Personal Welfare State Experiences Affect Political Trust and Ideology* (pp. 3-19). Palgrave Macmillan US
- Lind, E. A., Kanfer, R., dan Earley, P. C. (1990). Voice, control, and procedural justice: Instrumental and noninstrumental concerns in fairness judgments. *Journal of Personality and Social psychology*, 59(5), 952.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., dan Schoorman, F. D. (1995). An Integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20, 709-734.
- Mishler, W., dan Rose, R. (2001). What are the origins of political trust? Testing institutional and cultural theories in post-communist societies. *Comparative political studies*, 34(1), 30-62.
- Norris, P. (2001). *Digital Divide: Civic engagement, information poverty, and the internet worldwide*. Cambridge: Cambridge University Press
- Putnam, R. (1993). *Making democracy work: Civic traditions in modern Italy*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Putnam, R. (2000). *Bowling alone. The collapse and revival of american community*. New York: Simon and Schuster.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press. Cambridge, England
- Rudolph, T. J., dan Evans, J. (2005). Political trust, ideology, and public support for government spending. *American Journal of Political Science*, 49(3), 660-671.
- Rotter, J. (1967). A new scale for the measurement of interpersonal trust. *Journal of Personality*, Vol. 35, pp. 651-65.
- Rotter, J. (1980). Interpersonal trust, trustworthiness, and gullibility. *American Psychologists*, Vol. 35, January, pp. 1-7.
- Seyd, B. (2016). How should we measure political trust? *PSA Annual Conference Paper*. Brighton.
- Schiffman, L., Thelen, S. T., dan Sherman, E. (2010). Interpersonal and political trust: modeling levels of citizens' trust. *European Journal of Marketing*, 44(3/4), 369-381.
- Schoon, I., dan Cheng, H. (2011). Determinants of political trust: a lifetime learning model. *Developmental psychology*, 47(3), 619.
- Stokes, D. E. (1962). Popular evaluation of government: An empirical assessment. In H. Cleveland dan H. D. Lasswell (Eds.), *Ethics and bigness: Scientific, academic, religious, political and military* (pp. 61-72). New York: Harper
- Tao, R., Su, F., Sun, X., dan Lu, X. (2011). Political trust as rational belief: Evidence from Chinese village elections. *Journal of Comparative Economics*, 39(1), 108-121
- Wahyudi, H., Fernando, T., Ahmad, A., Khairani, A., Fatimah, F., Agung, I. M., dan Milla, M. N. (2013). Peran kepercayaan politik dan kepuasan demokrasi terhadap partisipasi politik mahasiswa. *Jurnal Psikologi* 9 (2), 94-99.

van Elsas, E. (2015). Political trust as a rational attitude: A comparison of the nature of political trust across different levels of education. *Political Studies*, 63(5), 1158-1178.

You, J. S. (2005). Corruption and inequality as correlates of social trust: Fairness matters more than similarity. Hauser Center for Nonprofit Organizations, Harvard University.